



Pemkab Gianyar Siapkan Rp 2 Miliar

PEMKAB Gianyar, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gianyar menyiapkan dana penanggulangan bencana sebesar Rp 2 miliar. Dana itu bisa dibagikan ke korban bencana dengan catatan korban bencana mengajukan proposal terlebih dulu.

Kepala BPBD Gianyar, Anak Agung Oka Digjaya, menyatakan masih sedang mendata kerusakan bangunan akibat gempa 7 Skala

Richter (SR) yang berpusat di Lombok Utara tersebut. "Ini hampir seluruh kecamatan kena. Saking banyaknya petugas masih menginventarisir jumlah kerugiannya," ujar Oka Digjaya, kemarin (7/8).

Pihaknya berharap penafsiran jumlah kerugian bisa direkap secepatnya. "Dari tafsiran kerugian itu kami bisa tahu, ketika ada masyarakat meminta bantuan bisa diberikan," ujarnya ■

► *Baca Pemkab Gianyar... Hal 11*

Cek Validitas Baru Diberi Bantuan

■ PEMKAB GIANYAR...

Sambungan dari hal 1

Mengenai kerugian yang menimpa masyarakat Gianyar, pemilik bangunan bisa mengajukan proposal. "Proposal ditujukan ke bupati. Lalu akan ada tim turun mengecek proposal itu," jelasnya.

Dikatakan Digjaya, dari proposal yang diajukan itu, tidak sepenuhnya akan ditanggung. "Karena kami sifatnya hanya simultan saja," terangnya. Kata Digjaya, bantuan pemerintah sebatas penyokong saja. "Untuk motifasi saja. Yang jelas kami sudah menyiapkan Rp 2 miliar untuk tahun ini," terangnya.

Pihaknya mengaku tidak berbelit-belit dalam penanganan bantuan bencana. "Kalau ada yang mengajukan, segera. Kami siapkan," tukasnya.

Di Buleleng, diperkirakan kerugian mencapai Rp 2,8 miliar. Pemerintah masih terus melakukan verifikasi terhadap laporan masyarakat. Selanjutnya kondisi itu akan dilaporkan pada Pemprov Bali, agar para korban bisa

mendapatkan bantuan.

Dari pantauan *Jawa Pos Radar Bali*, sebagian besar bangunan yang mengalami kerusakan, masih dibiarkan pemiliknya. Warga hanya berusaha menyelamatkan barang berharga yang masih bisa diselamatkan. Terutama pakaian dan surat-surat berharga.

Di beberapa tempat, pasukan dari TNI Angkatan Darat terlihat melakukan pembersihan puing-puing reruntuhan.

Sementara itu gedung di SDN 3 Depeha yang mengalami kerusakan akibat gempa, masih akan digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Pemerintah melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng berencana menghapus sejumlah bangunan yang ada di sana, dan segera membangun ruang kelas baru.

Sementara itu, data di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Buleleng menunjukkan, kerugian akibat gempa pada Minggu lalu mencapai Rp 2,8 miliar. Kerusakan meliputi rumah yang rata dengan tanah serta rusak berat. Ada pula keru-

sakan yang terjadi pada fasilitas umum, fasilitas sosial, pura, maupun *merajan* yang rusak. Total ada 172 bangunan rusak parah. "Data ini baru sementara. Kemungkinan masih bisa bertambah, karena tim kami masih melakukan pengecekan," kata Sekretaris BPDB Buleleng, Ketut Susila.

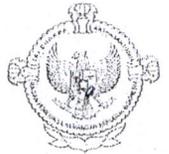
Selain itu, BPBD juga mencatat ada tiga orang yang mengalami luka-luka akibat musibah itu.

Terhadap para korban yang rumahnya mengalami kerusakan, maupun korban yang alami luka-luka, BPBD menyatakan segera mengusulkan dana bantuan ke Pemprov Bali. "Kami masih lakukan verifikasi dan berusaha mencatat sedetail mungkin kerugiannya. Nanti kami akan ajukan ke provinsi, dan dari provinsi akan melakukan *cross check*. Apabila dianggap valid, bantuan akan segera diberikan," ujar Susila.

BPBD Buleleng juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Karena teknologi tidak bisa memprediksi kapan gempa terjadi. (dra/eps/pit)

Edisi : Rabu, 8 Agustus 2018

Hal : 1 2 11



PAD Anjlok, Tabanan Defisit Anggaran Rp 31 Miliar

Dewan dan Eksekutif Kini Pusing Cari Akal Tutupi Defisit

TABANAN - Setelah rapat Banggar beberapa waktu lalu dibubarkan gara-gara Sekda Tabanan tidak hadir, akhirnya rapat kerja (raker) Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Tabanan bisa digelar Senin (6/8) kemarin di ruang rapat kantor DPRD Tabanan.

Dalam rapat tersebut terjadi perdebatan cukup alot soal APBD Tabanan 2018 yang mengalami defisit sangat besar. Dari data yang dihimpun koran ini, APBD Tabanan mengalami defisit sebesar Rp 41 miliar. Akibat turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Defisit tersebut baru bisa ditutupi dari

anggaran BKK provinsi sebesar Rp 10 miliar. Sehingga masih ada defisit Rp 31 miliar. Hal ini membuat kalangan DPRD Tabanan dan eksekutif yang tergabung dalam TAPD pusing mencari sumber dana untuk menutupi defisit tersebut.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Tabanan yang juga Ketua Banggar, I Ketut Suryadi, berlangsung alot. Sementara TAPD Pemkab Tabanan dipimpin Sekda I Nyoman Wirna Ariwangsa bersama tim termasuk Bapelitbang, Bakeuda, serta OPD penghasil PAD seperti kehabisan akal untuk mencari sumber pendapatan baru.

Dalam kesempatan tersebut Suryadi mempertanyakan tidak tercapainya target pendapatan daerah termasuk terjadinya defisit yang mencapai Rp 41 miliar. "Kami mohon penjelasan dari

TAPD," ucapnya kepada TAPD Pemkab Tabanan.

Sekda Tabanan, I Nyoman Wirna Ariwangsa menjelaskan, terjadi defisit akibat potensi pendapatan daerah turun. Seperti BPHTP, pajak daerah lainnya yang tidak sesuai dengan target termasuk pemasukan dari DTW (daerah tujuan wisata) di tabanan yang tidak mencapai target. Sehingga terjadi defisit sebesar Rp 41 miliar.

"Memang terjadi penurunan target pendapatan seperti dari PHR karena berhentinya operasi hotel NBR (Nirwana Bali Resort) di Tanah Lot, serta sektor lainnya," katanya.

Sementara kepala Bapelitbang IB Wirtamaja mengakui dalam waktu berjalan APBD 2018 terjadi defisit sebesar Rp 41 miliar. Untuk menutupi defisit tersebut awalnya pihaknya mengandalkan dana bantuan provinsi sebesar Rp 10 miliar

Edisi : Selasa, 7 Agustus 2018

Hal : 2



Radar Bali



JULIADI/RADAR BALI

MASA SULIT: Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tabanan dengan TAPD Pemkab Tabanan di ruang rapat kantor DPRD Tabanan, kemarin.

dan dana dari BRSU Tabanan sebar Rp 13 miliar. Sehingga masih kurang sekitar Rp 18 miliar.

Namun ternyata dana dari BRSU Tabanan tidak bisa dipakai untuk menutupi defisit tersebut. Karena harus digunakan membeli obat dan peralatan rumah sakit. "Jadi masih

ada defisit sekitar Rp 31 Miliar. Sementara dari pusat sudah tidak ada lagi kucuran dana," ucapnya.

Mendengar hal tersebut Ketua DPRD Tabanan yang akrab dipanggil Boping itu minta eksekutif segera mencari jalan keluar. Dia melihat banyak po-

tensi pendapatan yang masih bisa dioptimalkan seperti dari DTW. Dia juga mempertanyakan kenapa target dari DTW juga diturunkan. Padahal tarif sudah ditingkatkan. Kemudian kedatangan tamu relatif sama dari tahun sebelumnya, tetapi justru target pendapatan diturunkan. Apalagi ada rencana penerapan e-billing untuk tiket masuk. Bahkan Boping mendesak agar target tersebut dinaikkan sesuai target awal.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi III, I Wayan Lara. Menurut dia, dengan terjadinya defisit, TAPD maupun OPD penghasil harus kerja keras untuk merealisasikan target tersebut untuk membiayai pembangunan. "Semestinya dengan kondisi tersebut, OPD penghasil semakin kreatif dan inovatif mencari terobosan untuk peningkatan PAD," ungkapnya.

Lara juga mengatakan, melihat banyak potensi pendapatan yang belum tergarap maksimal seperti dari sektor hotel dan restoran, padahal banyak usaha perhotelan termasuk vila, penginapan dan restoran yang bisa menjadi objek pajak. Apalagi ada aturan baru yang memperbolehkan pemerintah memungut pajak, meski usahanya belum berizin. "Saya kira potensi pendapatan sangat besar belum tergarap," tandasnya.

Mendapat desakan tersebut akhirnya Kepala Bakeuda I Dewa Ayui Sri Budiarti hanya bisa mengiyakan desakan dewan untuk meningkatkan target pendapatan. Padahal semestinya 3 DTW yang ada di Tabanan yakni Jatiluwih, Tanah Lot dan Ulun Danu yang hanya menghasilkan PAD sekitar Rp 6,5 miliar per bulan, kini ditargetkan menjadi Rp 10 miliar. (uli/dit)

Edisi : Selasa, 7 Agustus 2018

Hal : 2



Badung Sedang Kaji Pemasukan PD Parkir

MANGUPURA - Pemkab Badung saat ini belum memiliki Perusahaan Daerah (PD) Parkir. Namun menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I Wayan Adi Arnawa, Badung sejatinya sudah melakukan kajian terkait PD parkir.

Menurutnya, kajian sedang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kabupaten Badung. Pendirian PD Parkir guna optimalisasi pendapatan daerah dari sektor parkir. "Untuk masalah itu (pendirian PD Parkir), saat ini masih dilakukan

kajian oleh Balitbang," jelas Adi Arnawa, Jumat (3/8).

Kata dia, rencana pendirian PD Parkir ini atas pemikiran Bupati untuk optimalisasi pendapatan parkir. Karena potensi parkir yang ada saat ini masih bisa dimaksimalkan. Mengenai pengelolaan parkir yang saat ini sebagian masih dilakukan oleh pihak Desa Adat, hal ini pun harus dikoordinasikan terlebih dulu. Karena selama ini bagi hasil antara pemerintah dengan Desa Adat selaku pengelola adalah, 75 persen untuk pengelola dan

25 persen untuk pemerintah. "Yang jelas, masih dalam kajian. Kalau hasil kajian nantinya dinilai memungkinkan, tentu PD Parkir akan segera diwujudkan," terang birokrat asal Pecatu, Kuta Selatan ini.

Secara terpisah, Ketua Komisi III DPRD Badung I Putu Alit Yandinata menyambut baik pendirian PD Parkir karena bisa mengoptimalkan pendapatan dari sektor parkir. "Kita memiliki kantong-kantong parkir yang sangat potensial. Di antaranya pusat perbelanjaan, parkir tepi

jalan seperti di Kuta yang selalu ramai, kawasan wisata, dan tempat keramaian lainnya," jelas politisi PDI Perjuangan Badung asal Abiansemai ini.

Imbuhnya, pendapatan parkir yang selama ini berkisar puluhan miliar, misal tahun 2018 ini ditargetkan Rp 27,6 miliar lebih akan bisa ditingkatkan. "Kalau dikelola dengan manajemen profesional dan penerapan teknologi, saya sangat yakin pendapatan dari pajak parkir akan meningkat," pungkasnya. (dwi/dit)

Edisi : Sabtu, 4 Agustus 2018

Hal : 9



APBD Karangasem Anjlok Rp 84 Miliar

Berdalih Galian C Tak Bisa Dipungut Retribusi

AMLAPURA- Karangasem dalam kondisi krisis. Ini terjadi karena pendapatan asli daerah (PAD) Karangasem terus merosot. Salah satu penyebabnya adalah galian C di Karangasem yang tidak bisa dipungut retribusi. Ini karena regulasi yang belum jelas. Hal ini dilaporkan

Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri dalam rapat Paripurna kemarin (3/8). Mas Sumatri mengatakan, APBD Induk Karangasem tahun 2019 dirancah Rp 1,4 triliun. Menurun sekitar Rp 84 miliar dari induk 2018 sebesar Rp 1,5 triliun lebih. Ini juga disebabkan karena PAD Karangasem tahun 2019 di pasang menurun yakni Rp 220 miliar. Sedangkan tahun 2018 lalu sebesar Rp 234 mil-

iar. Target ini menurut bupati cukup realistis karena kondisi Karangasem. Di antaranya belum bisa dipungut retribusi dari sektor galian C. Padahal selama ini sumber PAD Karangasem terbesar dari sektor tambang tersebut. Parahnya lagi diikuti penurunan dana perimbangan yakni Rp 951 miliar lebih tahun 2019, turun dari tahun 2018 yakni sebesar Rp 958 miliar. Dana perimban-

gan ini berasal dari hasil pajak, DAU, DAK dan bagi hasil.

Sebelum penyerahan Rencana KUA dan PPAS tahun 2019 ini juga dilakukan pengesahan dua Ranperda oleh DPRD Karangasem. Kedua Ranperda tersebut adalah Perda Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Perda Pertanggung Jawaban APBD 2017. Semua fraksi bisa menerima

kedua Ranperda tersebut untuk di sahkan sebagai Perda melalui pandangan fraksi DPRD Karangasem. Bupati mengakui selama pembahasan banyak pertanyaan dan masukan wakil rakyat Karangasem. "Semua itu juga sudah dijawab pihak eksekutif. Sekalipun masih ada yang kurang apa yang sudah dilakukan merupakan usaha yang maksimal," jelasnya. (tra/dot)

Edisi : Sabtu, 4 Agustus 2018

Hal : 2